



Politeia : Jurnal Pemikiran Politik Islam

P-ISSN : 2621-0312

E-ISSN : 2657-1560

Vol. 5, No. 1 Tahun 2022

DOI : 10.21043/politea.v5i1.14849

Pudarnya Ideologi Partai Islam Pascareformasi: Telaah atas Perjalanan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak Pemilu 2009-2019

Johan Wahyudi

Prodi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Jawa Timur, Indonesia

johanwahyudi@ub.ac.id

Abstract

In the midst of a dilemmatic condition about the consistency of maintaining an exclusive party ideology and the interest of winning the battle in the election, PKS began to carry out an inclusion-moderation strategy since 2009. This research aims to discuss the fading ideology of PKS since the 2009-2019 as one of the Islamic parties that is considered to have the clearest ideology when compared with other Islamic parties and with nationalist parties. This research used qualitative methods, meanwhile the data were collected through literature study. The result is political parties in Indonesia implement various strategies to gain as many votes in elections. There is a tendency to moderate and even marginalize ideologies in favor of winning contestation. Despite having a militant conservative religious voter base, PKS chose to moderate the party's ideology through an inclusion-moderation strategy from the 2009 election to the 2019 election. The fading ideology is a consequence of inclusion-moderation strategy. Therefore, in the context of formulating a public policy agenda, the ideological positions of political parties in Indonesia are almost indistinguishable.

Keywords: ideology, inclusion-moderation, ideological moderation, political party, Prosperous Justice Party (PKS).

Abstrak

Di tengah kondisi dilematis tentang konsistensi mempertahankan ideologi partai yang eksklusif dan kepentingan memenangkan pertarungan dalam pemilu, PKS mulai melakukan strategi inklusi-moderasi sejak 2009. Penelitian ini bertujuan untuk membahas memudarnya ideologi PKS. Sejak 2009-2019 sebagai salah satu partai Islam yang dianggap memiliki ideologi paling jelas jika dibandingkan dengan partai Islam lainnya dan dengan partai nasionalis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasilnya, partai politik di Indonesia melakukan berbagai strategi untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Ada kecenderungan untuk memoderasi bahkan meminggirkan ideologi demi memenangkan kontestasi. Meski memiliki basis pemilih religius konservatif yang militan, PKS memilih memoderasi ideologi partai melalui strategi inklusi-moderasi dari pemilu 2009 hingga pemilu 2019. Memudarnya ideologi merupakan konsekuensi dari strategi inklusi-moderasi. Oleh karena itu, dalam konteks perumusan agenda kebijakan publik, posisi ideologis partai politik di Indonesia hampir tidak dapat dibedakan.

Kata Kunci: ideologi, inklusi-,moderasi, moderasi ideologi, partai politik, PKS

Pendahuluan

Tulisan ini membahas memudarnya ideologi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai Islamis yang sejauh ini relatif memiliki tingkat kejelasan ideologi partai paling tinggi dibandingkan dengan partai politik lainnya di Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera yang awalnya bernama Partai Keadilan sejak pemilu 1999 dan sekarang telah bermetamorfosa menjadi Partai Keadilan Sejahtera sejak April 2002, secara ideologi relatif dikenal menonjol dalam laku politik sehari-hari. Hanya saja, dalam tiga episode pemilu terakhir mulai pemilu 2009, 2014 dan pemilu 2019, PKS mulai membuka diri dalam rangka memperluas dukungan elektoral. Hal ini tidak lepas dari beban elektoral PKS yang sejak awal didirikan mengandalkan kekuatan kader militan dan simpatisan yang berasal dari kalangan Islamis maupun kader sebagai konsekuensi dari ideologi partai yang berasaskan Islam (Muhtadi, 2012). Konsekuensi dari ideologi PKS adalah bahwasanya pemilih dari kalangan Islamis tidak serta merta mengidentifikasi diri mereka hanya kepada PKS sebagai representasi aspirasi umat Islam. Atas dasar itu, di tengah kondisi dilematis yakni konsistensi mempertahankan ideologi partai yang

eksklusif dan kepentingan memenangkan pertarungan dalam pemilu, akhirnya sejak tahun 2009 PKS mulai melakukan strategi inklusi-moderasi.

Perspektif inklusi-moderasi menjelaskan bagaimana interaksi antara kelompok Islamis (termasuk partai politik berbasis agama) dengan lembaga-lembaga demokrasi. Ketika kelompok Islamis berinteraksi dengan lembaga-lembaga demokrasi mereka mengalami transformasi dan mengadopsi lebih banyak sikap moderat terhadap demokrasi (Gurses, 2014). Kerangka analisis inklusi-moderasi melihat aktor politik maupun lembaga politik akan menjadi lebih moderat jika mereka berpartisipasi dalam proses politik yang kompetitif, seperti ikut pemilihan umum yang demokratis dan lain sebagainya. Di samping itu, sebagian besar aktor maupun kelompok akan menjadi lebih moderat karena alasan pragmatis yakni meningkatkan peluang seseorang atau kelompok termasuk partai politik untuk menarik konstituen yang lebih luas dengan harapan agar bisa mendapatkan kekuasaan (Schwedler, 2013). Dengan kata lain, ada kebutuhan dari kelompok Islamis (termasuk partai politik berbasis agama) saat mereka berpartisipasi dalam proses pemilu mereka akan menyesuaikan cita-cita dan tujuan sebelumnya untuk turut dalam logika permainan tawar-menawar kekuasaan.

Menurut Tepe (2005), partisipasi dalam sistem demokrasi seperti ikut serta dalam pemilu menyebabkan partai-partai berbasis agama akan melakukan proses 'sekularisasi internal' dengan mendefinisikan ulang dan menafsirkan kembali ide dan praktik keagamaan untuk mengakomodasi ide-ide sekuler. Ketika kelompok Islamis berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan cara mendirikan partai politik berbasis agama dan kemudian ikut pemilu, mereka berevolusi demi meraih kemenangan. PKS sebagai partai berbasis agama juga melakukan hal serupa dengan berupaya menawarkan ide pluralitas dan membuka ruang komunikasi dengan berbagai unsur kekuatan bangsa dalam rangka menjaring suara pemilih pada pemilu 2009 (*PKS Optimis Dan Membuka Diri*, 2009). Perspektif inklusi-moderasi ini pula yang dapat digunakan dalam menjelaskan bagaimana PKS sebagai partai religius dapat ikut serta dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi. Hanya saja, perolehan suara yang relatif stagnan dan fluktuatif sejak pemilu 1999 hingga pemilu 2019 mendorong PKS untuk melakukan

beragam strategi untuk meningkatkan pencapaian di setiap periode pemilu. Meski berideologi Islam, PKS sejak pemilu 2009 hingga pemilu 2019 ternyata memilih strategi inklusi-moderasi dalam rangka menjangkau ceruk pemilih yang lebih luas.

Berangkat dari masalah di atas, tulisan ini akan mengelaborasi bagaimana strategi PKS dalam rangka meningkatkan perolehan suara dalam pemilu 2009 hingga pemilu 2019 melalui strategi inklusi-moderasi. Dalam konteks perluasan arena dukungan elektoral, PKS relatif tidak jauh berbeda dengan partai-partai berideologi sekuler meski PKS tegas menyebut Islam sebagai ideologi partai. PKS melakukan moderasi ideologi demi memperluas basis elektoral dalam pemilu. Dengan demikian, PKS menambah daftar panjang partai politik yang masuk dalam gerbong catch-all parties (Tanuwidjaja, 2012). Pilihan untuk memoderasi ideologi meski diklaim oleh sebagian elit PKS adalah bagian dari penafsiran terhadap ajaran Islam sebagai ideologi partai, namun sulit pula disangkal bahwa moderasi ideologi pasti dilakukan dalam rangka memenangkan pemilu (Hidayat, 2012). Tidak hanya partai nasionalis, partai berbasis agama termasuk di dalamnya partai berideologi Islam pun cenderung menyesuaikan pandangan serta posisi politiknya demi keuntungan electoral (Elman & Warner, 2008). Oleh sebab itu, mudah dipahami mengapa PKS melepas baju ideologi eksklusifitas agar tidak menghadapi masalah elektoral saat turut serta dalam pemilu (Woodward et al., 2011)

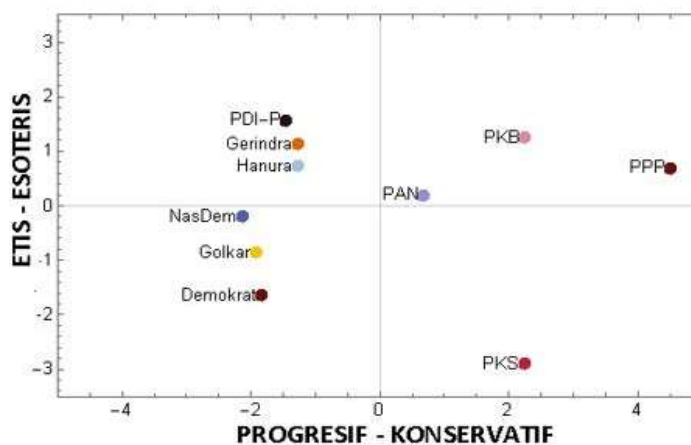
Selanjutnya untuk menjelaskan sepak terjang PKS menggunakan strategi inklusi-moderasi dalam tiga episode pemilu sejak 2009 hingga 2019 sebagaimana dideskripsikan sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan (library research), baik yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel, working paper, dan sumber dari internet yang relevan sebagai data sekunder. Data-data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan model analisis interaktif, dalam satu alur kegiatan, yakni; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun tujuan praktis dari studi ini adalah untuk memahami lebih jauh bagaimana perjalanan PKS sebagai partai yang dianggap menjadi benteng terakhir partai Islam yang diharapkan setia menjaga ideologi religiusnya dalam

meningkatkan perolehan suaranya dalam tiga episode pemilu terakhir yakni pemilu 2009, 2014, dan 2019. Studi ini diharapkan dapat melengkapi studi-studi sebelumnya terkait dengan adaptasi ideologi partai-partai Islamis khususnya dalam demokrasi demi kepentingan elektoral.

Hasil dan Pembahasan

Memahami Ideologi PKS

Dari sekian hasil kajian sebelumnya yang salah satunya dilakukan antara lain oleh Litbang Kompas pada tahun 2008, misalnya, menjadikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai yang memiliki ideologi paling kuat dibandingkan partai politik lainnya. PKS secara tegas menjadikan Islam sebagai ideologinya. Dalam Anggaran Dasar Pasal 2 disebutkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berasaskan Islam dengan tekad bahwa Islam difahami dalam formula baru sehingga tidak terjebak pada formalism (Nasiwan, 2015). Sejak pemilu 1999 Partai Keadilan (yang saat ini telah bermetamorfosa menjadi Partai Keadilan Sejahtera sejak April 2002), merupakan satu-satunya partai yang tampil beda dibandingkan dengan partai-partai lain. Kejelasan ideologi yang dianut dan ditawarkan kepada pemilih yakni ideologi Islam menjadi ciri paling mencolok yang membedakan PKS dengan partai lain. Ideologi PKS diturunkan menjadi platform, visi dan misi partai yang mencakup ide tentang negara dan masyarakat yang dianggap ideal bagi terwujudnya cita-cita partai.



Gambar 1. Spektrum Ideologi Partai Politik Indonesia (Ardian Maulana, 2018)

Dalam rangka memahami ideologi PKS, penting untuk dilihat spektrum ideologi partai politik di Indonesia. Gambar 1 di atas menunjukkan visualisasi posisi setiap partai dalam 4 kuadran ideologi, yaitu kuadran progresif – esoteris (PDIP, Gerindra, Hanura), konservatif – esoteris (PAN, PKB, PPP), konservatif – etis (PKS) dan kuadran progresif – etis (NasDem, Partai Golkar, Demokrat). Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, sumbu orientasi progresif – konservatif memisahkan dengan baik partai-partai berbasis agama (PAN, PKS, PKB, PPP) yang berorientasi konservatif dan partai-partai non agama (PDIP, Gerindra, Hanura, NasDem, Golkar dan Demokrat) yang berorientasi progresif. Poin penting lainnya menunjukkan bagaimana PKS sendiri berada di kuadran ideologi konservatif – etis. Spektrum ideologi ini menunjukkan bahwa meski sama-sama konservatif dengan partai Islam lainnya, PKS lebih berorientasi etis, misalnya dalam hal kebijakan ekonomi. Lebih jauh, PKS dapat disebut sebagai fenomena baru politik Islam di Indonesia sebab tidak memiliki akar sejarah pada organisasi-organisasi Islam yang ada atau pernah ada di Indonesia. Hal ini berbeda dengan PAN, PPP dan PKB yang berasosiasi kuat dengan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (Maulana, 2013). Dengan demikian, terlihat dengan jelas bagaimana posisi ideologi PKS bila dibandingkan dengan partai politik lainnya, baik yang berbasis agama maupun berbasis non agama.

Selanjutnya, ideologi Islam dan cita-cita politik PKS dioperasionalkan dengan merujuk pada tiga prinsip utama, yakni (1) kemenyeluruhan dan sistem Islam yang final; (2) otoritas syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad; dan (3) kesesuaian aplikasi sistem dan solusi Islam dengan setiap zaman dan tempat. Merujuk pada ketiga prinsip tersebut nilai-nilai keislaman kemudian dijelaskan dalam uraian yang lebih operasional sebagai working ideology PKS yang dapat ditemukan formalitasnya dalam Platform Kebijakan Pembangunan PKS. Adapun Platform PKS dalam bidang politik adalah memperjuangkan konsepsi-konsepsi Islam dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Dalam pemahaman PKS, konsepsi Islam tersebut misalnya diwujudkan dalam konsep masyarakat madani yakni gambaran masyarakat yang dulu pernah dibentuk Nabi Muhammad saat di Madinah. Masyarakat tersebut akan mengayomi seluruh masyarakat yang ada. Adapun bentuk pengayomannya berwujud dalam bentuk perlindungan dan jaminan keselamatan serta jaminan kebebasan dalam menjalankan

agama bagi umat non muslim (*Partai Keadilan Sejahtera*, 2022). Demi mewujudkan cita-cita tersebut, maka PKS akan membangun komunikasi politik baik dengan konstituennya maupun dengan bangsa Indonesia pada umumnya. Dengan pemahaman seperti ini maka PKS akan selalu berusaha untuk menjalankan misi dakwah melalui operasionalisasi substansi platform politik mulai dari tingkat pusat hingga level daerah dalam konteks kebijakan publik oleh kader yang menduduki jabatan publik (Darmawan, 2016).

Tidak hanya itu, manajemen organisasi partai yang rapi dan profesional menjadi aspek pembeda lain dari PKS dengan partai lainnya (Muhtadi, 2012). Selain itu, asas egalitarianisme menjadi kunci dari aktifitas perpolitikan PKS sehingga PKS tidak mengandalkan figur sentral tertentu (Hamayotsu, 2011). Dengan kata lain, siapa pun bisa menjadi figur dalam PKS selama figur tersebut telah memahami dan mengikuti proses pengkaderan yang ketat dalam organisasi partai. Sejak partai ini bermetamorfosis dari gerakan tarbiyah menjadi partai politik (PK) untuk pertama kalinya pada 9 Agustus 1998 (kemudian bertransformasi jadi PKS pada 20 April 2002), tata cara rekrutmen anggota pun mulai ditata dan dibenahi. Hal ini dilakukan agar komitmen sebagai gerakan dakwah tetap terjaga. Adapun beberapa jenjang rekrutmen yang harus dilewati yakni mulai dari ta'lim (pendalaman ilmu), tanzhim (penataan), taqwin (pembentukan), dan taqwim (proses evaluasi) (Edward, 2006). Muara dari proses panjang pengkaderan nantinya diharapkan akan lahir anggota yang mampu menjadi juru dakwah sesuai dengan misi dan ideologi partai seperti yang termaktub dalam Anggaran Dasar partai (Waluyo, 2005). Berikut disajikan tabel jenjang keanggotaan PKS:

Jenis Keanggotaan	Pengertian
Anggota Pemula	Mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) setelah lulus mengikuti Training Orientasi Partai I (satu).
Anggota Muda	Mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar satu.

Anggota Madya	Mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar dua.
Anggota Dewasa	Mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat lanjut.
Anggota Ahli	Mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat tinggi.
Anggota Purna	Mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli.
Anggota Kehormatan	Mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Majelis Pertimbangan Partai.

Tabel 1. Jenjang Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (Djony Edward, 2006)

Mencermati jenjang keanggotaan PKS di atas, sangat mudah dibaca bagaimana selektifnya PKS dalam merekrut kader atau anggota. Sebab tiap-tiap jenjang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda bagi partai. Semakin tinggi jenjang keanggotaan, semakin besar pula tanggung jawabnya terhadap partai. Oleh sebab itu, PKS dapat dikategorikan ke dalam tipologi partai yang eksklusif. Artinya, PKS sebagai partai yang lahir dari gerakan tarbiyah akan senantiasa patuh terhadap garis ideologi partai dalam memperjuangkan kepentingan konstituennya. Memang disebutkan dalam Anggaran Dasar partai pasal 5 tentang sistem dan prosedur keanggotaan bahwa anggota partai terdiri dari anggota kader pendukung, anggota kader inti, dan anggota kehormatan. Namun, tetap saja asas partai adalah Islam dan jati diri partai yakni Partai Dakwah. Sehingga saat PKS mulai berkompromi dengan realitas politik yang dimulai dengan memoderasi ideologi, beradaptasi dengan pluralitas pemilih serta membuka diri bagi semua anggota lintas agama dan suku bangsa, maka ideologi PKS sebagai partai religius pun mulai dipersoalkan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut-sebut sebagai “*The Rising Star*” oleh banyak pengamat dalam sejarah partai politik di Indonesia pasca tumbangannya rezim non-demokratis. Hal ini tidak lepas dari capaian elektoral PKS sejak kemunculannya pasca didirikan pada Agustus 1998 lalu. PKS berhasil mengumpulkan perolehan suara sebesar 1.436.565 atau setara dengan 1,36 persen dari keseluruhan jumlah suara nasional pada pemilu tahun 1999. Selanjutnya pada pemilu 2004, PKS kembali sukses memperbaiki catatan elektoralnya dengan perolehan 8.325.020 suara atau sekitar 7,34 persen total suara. Atas dasar itu, 45 orang kader berhasil melanggang ke Senayan sebagai anggota legislatif. Tidak berhenti sampai di situ, mantan presiden PKS pun terpilih menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (Rahmat, 2008). Hanya saja, raihan suara yang belum menyentuh dua digit serta belum mampunya PKS menjadi pemenang pemilu mendorong PKS untuk berpikir lebih keras lagi. Sehingga PKS kemudian mulai menerapkan strategi inklusi-moderasi sejak pemilu 2009 dalam rangka memperbesar ceruk pemilih dan mewujudkan cita-cita politiknya.

Memahami Ideologi PKS

Keberanian PKS mendeklarasikan diri untuk menjadi partai terbuka mendapatkan respon beragam dari publik, bahkan juga datang dari internal PKS. Akibatnya, tidak sedikit dari pendiri partai yang memilih untuk meninggalkan partai. Arief Munandar (2011) mencatat dengan sangat baik bagaimana pro kontra terkait eksistensi PKS sebagai partai terbuka. Setidaknya, ada tiga pandangan utama dalam merespons posisi PKS sebagai partai terbuka. Pertama, pandangan yang mendukung (*pro*). Pandangan ini berargumen bahwa PKS memang melakukan komunikasi politik yang terbuka dengan semua pihak, memiliki pasar yang lebih luas, keterbukaan bukan hanya milik partai, bahkan agama juga membuka diri bagi siapa pun, bisa berkompromi dengan siapa saja tanpa memandang ideologi. Dengan kata lain, demi kepentingan elektoral agar PKS bisa memenuhi perolehan suara di atas 20% dan bahkan menjadi pemenang pemilu maka moderasi ideologi atau adaptasi ideologi demi mengakomodir pemilih di luar kader tarbiyah merupakan strategi rasional yang bisa dipilih.

Kedua, pandangan yang netral. Ide keterbukaan PKS merupakan strategi “lompatan tinggi” yang penuh risiko menurut pandangan ini. Risiko tersebut adalah terbukanya peluang PKS dapat diterima publik secara luas atau sebaliknya. PKS berpeluang ditinggalkan sebagian kadernya yang kecewa apalagi dalam kultur PKS yang minim diskusi. Hanya saja, PKS tetap menjadi Partai Kader meski terbuka, sehingga tidak ada urgensinya disampaikan secara bombastis di hadapan publik. Ketiga, pandangan yang menolak (kontra). Wacana menjadikan PKS sebagai partai terbuka dianggap oleh kelompok ini bukanlah keputusan Majelis Syura yang dikomunikasikan secara jernih kepada publik. Ide partai terbuka ditolak sebab dianggap akan mendistorsi identitas PKS sebagai Partai Islam. Akibat dari distorsi dikhawatirkan PKS menjadi seperti beberapa partai lain yang tidak jelas “jenis kelaminnya” serta dianggap sebagai “kejahatan ideologi” karena akan menyempitkan kontinum ideologi hingga menyuburkan pragmatisme.

Mantan Dewan Syariah Wilayah PKS, Sigit Pranowo menyebutkan bahwa perubahan ideologi PKS merupakan sebuah kemunduran bagi PKS. Sembari menyitir sejarah perjuangan nabi Muhammad dalam memperjuangkan Islam, ia menyebutkan bahwa nabi tidak pernah malu untuk menyampaikan kebenaran. Karena itu, dalam sebuah wawancara ia mengatakan: “Kenapa PKS justru terkesan malu-malu. Islam itu bukan sebuah kemunduran dalam demokrasi. Justru Islam diajarkan bagaimana kita bisa merangkul semua golongan tanpa menghilangkan jati diri sebagai muslim” (*Tinggalkan Ideologi Islam, PKS Lemah Ditinggal Pergi Para Penderitanya*, 2011).

Kekhawatiran Sigit Pranowo tentu saja bisa dipahami dalam kerangka besar untuk mempertahankan ideologi partai. Karena memoderasi ideologi Islam dengan ide keterbukaan dianggap sebagai bentuk inkonsistensi PKS terhadap ajaran agama Islam yang mereka pegang selama ini. Ide untuk membuka diri bagi anggota partai dari kalangan non-muslim, tidak lebih sebagai strategi elektoral PKS untuk memperbanyak kantong-kantong suara. Itu artinya, PKS kini tidak lagi memahami ideologi yang mereka anut selama ini sebagai partai dakwah yang berjuang untuk kepentingan Islam secara kaku. Karena faktanya, PKS berkompromi dengan realitas politik untuk mendapatkan

kekuasaan meski harus menegosiasikan ideologinya. Merujuk pengalaman partai berbasis agama di negara lain, PKS bukanlah satu-satunya partai yang melakukan strategi tersebut. Di Malaysia, ada Parti Islam se-Malaysia (PAS) serta Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkinma Partisi, AKP) di Turki yang juga mempraktikkan moderasi ideologi maupun Partai Hijau di Eropa atau Australia (Gurses, 2014).

Menjadi partai terbuka demi memperluas ceruk pemilih di luar kader dan pemilih muslim adalah tantangan PKS yang memang lahir dari rahim gerakan dakwah. PKS saat ini sedang berada di antara “dua karang”, konsisten (secara ideologi) memilih strategi partai sebagai representasi basis sosial atau menggunakan logika elektoral untuk meraih simpati pemilih (Muhtadi, 2012). Faktanya, dalam dua jilid pemilu sebelumnya, PKS masih konsisten dengan pilihan pertama. Namun menjelang pemilu tahun 2009, PKS secara mengejutkan memilih logika elektoral dengan memoderasi ideologi untuk memperluas basis suara. Hasilnya, PKS mampu menambah perolehan suara di pemilu 2009 walau tidak signifikan. Meski demikian, PKS masih memperkuat bangunan ideologi partai untuk menciptakan kader loyal dan militan melalui adopsi ideologi al-Ikhwân al-Muslimûn (IM). Sementara untuk mencapai misi ideologi Islam, PKS melakukan modifikasi dan kompromi dengan sistem politik Indonesia agar dapat bertahan (Aminuddin & Masykuri, 2015).

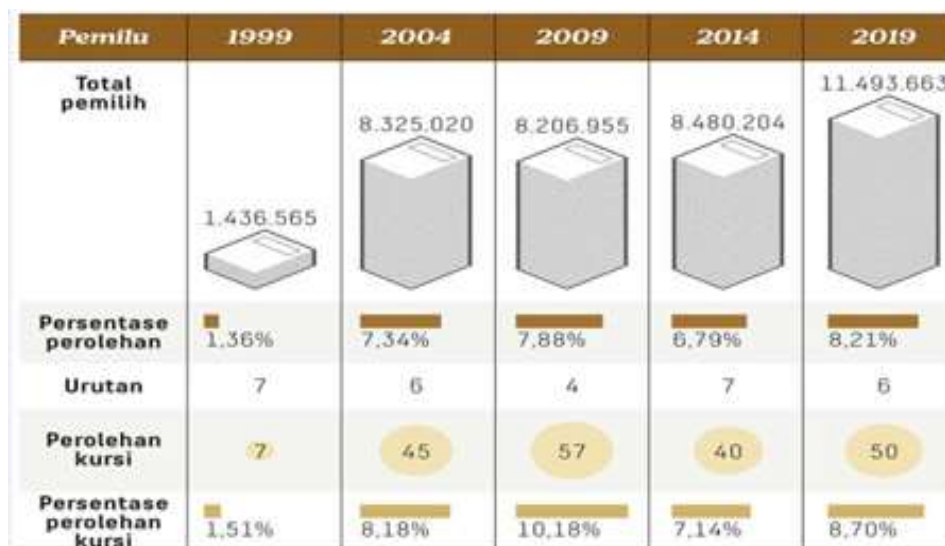
Moderasi ideologi PKS menjadi terbuka dianggap mencerabut PKS dari habitatnya. Sebab selama ini PKS selalu dibandingkan dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang menggunakan atribut Islam sebagai jalan dakwah. Setelah bertransformasi dari PK menjadi PKS, ideologi partai yang mengusung asas Islam semakin diperkuat. Bahkan dalam konteks pergeseran ideologi dari PK menjadi PKS, warna partai ini justru sangat dekat dengan Ikhwanul Muslimin, baik dari sisi ideologi, pemikiran, maupun langkah-langkah politik yang ditempuh (Rahmat, 2008). Pasca pemilu 1999 saat lembaga-lembaga demokrasi belum berfungsi dengan baik dalam kompetisi politik, PKS masih mampu menjalankan kebijakan partai secara ideologis melalui kerja sama dengan partai-partai Islam serta memiliki sentimen anti sekuler yang kuat selama masa transisi

demokrasi. Tetapi pasca demokratisasi mulai terkonsolidasi dan lembaga-lembaga demokrasi berfungsi lebih efektif dalam menyediakan arena interaksi dan transaksi politik, tindakan PKS menjadi lebih pragmatis. Contohnya saat PKS bergabung dengan pemerintah dan mendukung kebijakan yang tidak populer meskipun harus menghadapi protes dari konstituennya sendiri. Sebelumnya, PKS justru bergabung dan berkoalisi dengan partai sekuler, bahkan Kristen dalam pemilihan di tingkat lokal (Permata, 2008).

Kesulitan untuk menyeimbangkan ideologi dengan kepentingan politik adalah dilema yang terus mengiringi langkah PKS dalam konteks elektoral, termasuk pula partai-partai Islam lainnya di Indonesia. Pada saat yang sama, kesulitan memperluas basis pemilih telah menjadi titik tengkar internal partai untuk menentukan aspek ideologis mana yang harus dipertahankan dan bagian mana yang harus dibuang (Bubalo et al., 2012). Kondisi dilematis seperti inilah yang mendorong PKS memilih untuk membuka diri dan lebih pragmatis dalam urusan elektoral sejak pemilu 2009 hingga pemilu 2019. Partai politik di era reformasi rupanya mengalami kondisi serupa dimana pengkaderan berbasis nilai moral dan ideologi tertentu relatif ditinggalkan karena partai berusaha menjaring kader yang lebih luas agar dapat memenangkan pemilu. Meskipun konflik pernah menimpa beberapa partai politik, namun konflik yang dipicu oleh faktor ideologi umumnya sudah jarang terjadi selama era reformasi. Hal ini karena sebagian besar partai di Indonesia cenderung menjadikan diri mereka sebagai partai terbuka dan memoderasi ideologi mereka (Amal, 2012).

Kehadiran PKS dalam aktifitas politik bertolak dari kebutuhan untuk menyeimbangkan aspirasi Islam dengan realitas sosial-politik masyarakat. Meskipun untuk mewujudkan harapan massa, simbol dan slogan Islam dimodifikasi sedemikian rupa. Sikap pragmatis PKS bertujuan untuk menarik dukungan secara luas dari rakyat Indonesia (Machmudi, 2008). Meskipun ada pandangan netral yang melihat PKS berupaya melakukan penyesuaian terhadap realitas politik tanpa meninggalkan ideologinya serta memoderasi ideologi sebagai bentuk interpretasi dari ajaran Islam, tetap saja aroma pragmatisme sangat kentara. Di sisi lain, meski PKS tetap menggunakan ideologi sebagai instrumen untuk melegitimasi tindakan politik serta

menjaga loyalitas anggotanya, tetapi dalam praktiknya titik tekan strategi moderasi PKS lebih kepada upaya agar memperoleh suara sebanyak mungkin dalam pemilu (Hidayat, 2012). Sebagai partai politik yang bertujuan sebagai kendaraan politik konstitusional untuk merebut kemenangan melalui pemilu, PKS juga melakukan berbagai strategi elektoral untuk menjadi pemenang pemilu. Atas dasar itu, PKS memilih berpikir realistik dengan merevisi garis ideologi partai dan perilaku politiknya menjadi partai elektoralis dengan cara merangkul semua segmen pemilih dari beragam latar belakang agama, suku, profesi, kelompok usia, jenjang pendidikan, jenis kelamin, domisili desa-kota, dan lain-lain (Muhtadi, 2012).



Gambar 2. Perolehan Suara dan Kursi PKS 1999-2019 (KPU, Diolah Litbang Kompas/BST)

Meski ditinggal pemilih lama akibat mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka, tetapi pada pemilu 2009 suara PKS mengalami peningkatan dari pemilu sebelumnya dengan perolehan 7,88 persen. PKS berhasil mengutus 57 orang ke parlemen, meski capaian tersebut masih belum mampu menyaingi perolehan suara partai-partai nasionalis seperti Demokrat, Golkar maupun PDI-P. Capaian tersebut mengejutkan sebab pada tahun 2008 menjelang pemilu 2009, PKS justru menyelenggarakan Munas di Bali yang mana salah satu *output* penting Munas Bali adalah PKS menjadi partai terbuka. Ide

tersebut kemudian dipertegas kembali pada Musyawarah Nasional Ke-2 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 16-20 Juni 2010 di Jakarta yang menyebut PKS sebagai partai inklusif. Ide dan semangat keterbukaan tersebut diambil dalam rangka mengakomodasi keanggotaan partai dari kalangan non muslim secara legal. Dengan demikian, maka ceruk pemilih di wilayah-wilayah yang bukan mayoritas muslim seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur bisa dimanfaatkan demi keuntungan elektoral partai (Wijaya, 2011).

Pada pemilu tahun 2014, PKS kembali melanjutkan strategi inklusi-moderasi dengan cara membuka diri bagi semua segmen pemilih, termasuk mendukung calon kepala daerah dan calon legislatif dari kalangan non muslim. Menurut Hidayat Nurwahid, keterbukaan PKS untuk mendukung caleg dan calon kepala daerah dari non muslim bukan berarti PKS telah melenceng dari tujuan awal pendiriannya. PKS melakukan hal tersebut dalam rangka membuka diri maupun membangun komunikasi serta jalinan koalisi dengan pihak manapun selama tidak bertentangan dengan aturan dasar partai. Lebih jauh, Hidayat menjelaskan bahwa jika PKS memiliki politisi non-muslim bukanlah sebuah hal yang aneh. Apabila mereka telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan PKS, maka semua menjadi sah (*PKS Semakin Terbuka Tampung Caleg Non-Muslim*, 2014). Dengan kata lain, Hidayat hendak mengatakan bahwa dengan memoderasi ideologi dan membuka diri untuk memperluas cakupan pemilih dari kalangan non-muslim sekalipun bukan berarti PKS mengubah ideologi partai dari Islam ke tidak Islam. PKS hanya menjalankan fungsi parpol karena partai politik sejatinya harus bisa adaptif dan moderat untuk bekerja sama dengan siapa pun.

Hal menarik lain untuk dicatat adalah meski PKS masih membuka diri dengan memoderasi ideologi, namun dalam konteks Pemilu Legislatif 2014, PKS tetap menegaskan komitmen partai pada ideologi dan nilai yang dianutnya sebagai partai dakwah. Hal ini dilakukan dalam rangka mempertahankan soliditas kader militan. Presiden PKS kala itu, Sohibul Iman, menjelaskan bahwa Platform Kebijakan Pembangunan PKS menegaskan karakteristik PKS adalah partai dakwah yang tidak hanya memperjuangkan kekuasaan dalam rutinitas pemilu lima tahunan saja, tetapi juga berlaku bagi penegasan ideologi partai secara jangka panjang. Menurut Sohibul Iman,

platform visi, misi, dan prioritas PKS pada Pemilu Legislatif 2014 tetap berbasas Islam dan menjadikan Islam sebagai inspirasi (*Platform PKS Di 2014*, 2014) (Anawati & Al-Hamdi, 2020). Atas dasar itu, dapat dipahami kemudian bagaimana perolehan suara PKS pada pemilu 2014 mengalami penurunan menjadi 6,79 % dari yang sebelumnya 7,88 % pada pemilu tahun 2009.

Sementara pada pemilu tahun 2019, PKS kembali melanjutkan identitasnya sebagai partai Islam yang inklusif (partai terbuka) yang ditandai dengan pemilihan isu ekonomi seperti tawaran program penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup bagi warga apabila PKS menang pemilu. PKS sengaja memasang isu yang tidak berbau agama karena PKS sadar bahwasanya tidak semua pemilih bisa ditarik dengan isu agama. Selain itu, data perolehan suara partai-partai Islam pasca reformasi terus mengalami penurunan karena kegamangan menjual isu agama yang tidak berbanding lurus dengan perolehan suara partai (*Harap-Harap Cemas Nasib Partai Islam Di Pemilu 2019*, n.d.). PKS yang sejak awal menjadi partai berbasis kader, relatif bisa mempertahankan dukungan elektoral dan pada pemilu tahun 2019 berhasil menjaga tren suara yang positif yakni sebesar 8,21 %, paling tinggi dalam sejarah keikutsertaannya dalam pemilu sejak pemilu tahun 1999. Hal ini salah satunya disebabkan oleh strategi inklusi-moderasi PKS yang dilakukan dengan cara menjual isu ekonomi sekaligus mengakomodasi calon legislatif dan kepala daerah dengan latar belakang non-muslim terutama di kantong-kantong wilayah non Islam di Indonesia. Strategi inklusi-moderasi mengandaikan adanya praktik tawar-menawar demi mewujudkan cita-cita beroleh kekuasaan.

Selain itu, sejak PKS dipimpin Sohibul Iman periode 2015-2020, sejumlah elit PKS terus menerus mendiseminasikan istilah PKS sebagai “Partai Terbuka”. Istilah tersebut lahir dalam rangka mengirimkan pesan kepada pemilih bahwa PKS adalah partai yang tidak menutup diri untuk bekerja sama dengan siapa pun tanpa sekat-sekat ideologis. PKS adalah partai yang berasaskan Islam yang inklusif dan selalu membuka diri bagi siapa pun. Dari sini terlihat jelas bagaimana PKS membangun citra sebagai partai inklusif dan moderat agar pemilih tidak ragu mendukung mereka dalam pemilu.

Meskipun inklusifitas yang dimaksud PKS tidaklah bebas nilai. Artinya, dalam praktik dan kerja politiknya yang terbuka, PKS tetap memperhitungkan dasar keputusannya berdasarkan nilai keislaman yang dijunjung. Hal ini misalnya, terlihat dari fakta bahwa meski ada sedikit calon dari luar Islam dan luar tarbiyah, mereka harus melewati mekanisme Syura (Nurhasim & dkk, 2016). Berkaca pada pengalaman pemilu 2009, 2014 hingga pemilu 2019, PKS memang mulai konsisten untuk membuka diri agar bisa memperluas basis massa terutama di daerah-daerah di luar kota-kota besar serta di luar Jawa. Sebagai partai yang lahir dari rahim kelompok Islamis, PKS bertransformasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan elektoral menggunakan strategi inklusi-moderasi agar lebih bisa diterima di tengah-tengah pemilih.

Kesimpulan

Mengacu pada berbagai praktik yang dilakukan partai-partai politik beraliran nasionalis serta partai-partai berideologi Islam khususnya PKS pasca reformasi, terbaca sebuah fenomena serius bahwa garis ideologi partai kini kian memudar. Ideologi partai yang termaktub dalam AD/ART bisa saja ideal, sementara dalam praktiknya ideologi dapat dimoderasi demi kepentingan kekuasaan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai Islam yang dianggap memiliki ideologi yang paling jelas sekalipun bila dibandingkan dengan partai Islam lain maupun partai berideologi nasionalis, nyatanya juga memoderasi ideologi demi memperluas ceruk pemilih. Ideologi PKS yang semakin memudar sebagaimana dijelaskan dalam tulisan ini disamping mengindikasikan menguatnya pragmatisme politik, pada saat yang sama juga menjadi pilihan strategi politik PKS untuk mendongkrak perolehan suara sejak pemilu 2009 hingga pemilu 2019.

Sebagai partai berbasis agama yang memiliki keterbatasan basis pemilih, PKS berusaha menata wajah sebagai partai inklusif dan moderat dengan cara memoderasi ideologi. Keberadaan basis pemilih religius konservatif tidak cukup untuk membawa PKS memenangkan pemilu. Oleh sebab itu, sejak pemilu 2009, 2014, hingga pemilu 2019 PKS membuka diri bagi semua elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan perolehan suara. Perjalanan PKS dalam kurun waktu 2009 hingga 2019 menunjukkan

bahwa partai politik dengan ideologi apapun termasuk partai Islam pada saatnya akan selalu berusaha beradaptasi dengan realitas politik. Pasca reformasi di Indonesia, partai-partai Islam termasuk PKS melakukan beragam strategi elektoral demi memenuhi ambisi untuk menang pemilu dan berkuasa. Meski strategi inklusi-moderasi yang dilakukan PKS berdampak positif terhadap perolehan suara, namun fenomena tersebut sekaligus membawa konsekuensi pada ketidakjelasan posisi partai politik dalam konteks perumusan agenda-agenda kebijakan publik.

Referensi

- Abdullah, W. J. (2018). Inclusion-moderation or political opportunity? Lessons from the case of Parti Islam Se-Malaysia (Pan-Malaysian Islamic Party, PAS). *Commonwealth & Comparative Politics*, DOI: 10.1080/14662043.2018.1517958.
- Amal, I. (2012). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, Edisi Kedua*. Tiara Wacana.
- Anawati, D. M., & Al-Hamdi, R. (2020). Soliditas Partai dan Stabilitas Perolehan Suara: Konsolidasi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum Legislatif 2014. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1).
- Bubalo, A., Fealy, G., & Mason, W. (2012). *PKS dan Kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia*. Komunitas Bambu.
- Darmawan, D. (2016). *Volatilitas Elektoral Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*”, dalam Moch. Nurhasim (ed.) *Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya*. Pustaka Pelajar bekerja sama dengan P2P LIPI.
- Edward, D. (2006). *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera*. Syaamil.
- Elman, M. F., & Warner, C. M. (2008). Democracy, Security, and Religious Political Parties: A Framework for Analysis. *Asian Security*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14799850701783106>
- Gurses, M. (2014). Islamists, democracy and Turkey: A test of the inclusion-moderation hypothesis. *Party Politics*, 20(4). <https://doi.org/10.1177/1354068812448688>
- Hamayotsu, K. (2011). The End of Political Islam? A Comparative Analysis of Religious Parties in the Muslim Democracy of Indonesia. *Journal of Current*

Southeast Asian Affairs, 30(3), 133–159.
<https://doi.org/10.1177/186810341103000305>

Harap-harap Cemas Nasib Partai Islam di Pemilu 2019. (n.d.). Tempo.Co.
<https://nasional.tempo.co/read/1181347/harap-harap-cemas-nasib-partai-islam-di-pemilu-2019>

Hidayat, S. (2012). *Managing Moderation: The AKP in Turkey and The PKS in Indonesia*. University of Exeter.

Machmudi, Y. (2008). *Islamising Indonesia. The Rise of Jemaah Tarbiyah and The Prosperous Justice Party (PKS)*. ANU E PRESS.

Maulana, D. (2013). Partisipasi Politik Perempuan dan Kebijakan Publik di Propinsi Banten. *Jurnal Komunikasi*, 2(2), 32–39.

Muhtadi, B. (2012). *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Nasiwan. (2015). *Dilema Transformasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*. Universitas Indonesia.

Nurhasim, M., & dkk. (2016). *Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-faktor Penyebabnya*. Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Partai Keadilan Sejahtera. (2022). Kompaspedia.
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/partai-keadilan-sejahtera>

Permata, A. N. (2008). Ideology, Institutions, Political Actions: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *Asien 19*.

PKS optimis dan membuka diri. (2009). BBC Indonesia.
https://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/03/090330_kampanyepks.shtml

PKS semakin terbuka tampung caleg non-muslim. (2014). Merdeka.Com.
<https://www.merdeka.com/politik/pileg-2014-pks-semakin-terbuka-tampung-caleg-non-muslim.html>

Platform PKS di 2014. (2014). Sindonews.Com.
<https://nasional.sindonews.com/berita/824289/12/platform-pks-di-2014>

Rahmat, M. I. (2008). *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. LKiS.

Schwedler, J. (2013). Islamists in Power? Inclusion, Moderation, and the Arab Uprisings. *Middle East Development Journal*, 5(1), 1350006-1-1350006–1350018.
<https://doi.org/10.1142/S1793812013500065>

Tanuwidjaja, S. (2012). PKS in Post-Reformasi Indonesia. *South East Asia Research*, 20(4), 533–549. <https://doi.org/10.5367/sear.2012.0127>

- Tinggalkan Ideologi Islam, PKS Lemah Ditinggal Pergi Para Pendirinya.* (2011). Voa. <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2011/04/14/14161/tinggalkan-ideologi-islam-pks-lemah-ditinggal-pergi-para-pendirinya/>
- Waluyo, S. (2005). *Kebangkitan Politik Dakwah: Konsep dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi.* Harakatuna Publishing.
- Wijaya, S. H. B. (2011). Komunikasi Politik Partai Terbuka ala PKS. *Jurnal Komunikasi Massa*, 4(1).
- Woodward, M., Amin, A., Rohmaniyah, I., & Lundry, C. (2011). *A New Cultural Path for Indonesia's Islamist PKS?*